

Implementasi Program Penguatan Pendidikan Karakter di SMK Negeri 7 Semarang

Oleh:

Indah Dwi Mawarni¹, Retna Hanani, S.Sos, MPP²

Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang

Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 746540

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implementasi program pendidikan karakter di SMK Negeri 7 Semarang serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan karakter di SMK Negeri 7 Semarang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumen dan studi kepustakaan. Hasil penelitian berupa terdapat implementasi program penguatan pendidikan karakter di SMK Negeri 7 Semarang berupa pembiasaan nilai-nilai karakter berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan karakter Pada Satuan Pendidikan Formal berupa nilai religius, nasionalis, integritas, mandiri, dan gotong royong yang terintegrasi dalam kurikulum di SMK Negeri 7 Semarang. Serta terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi PPK di SMK Negeri 7 Semarang berdasarkan teori Implementasi Kebijakan Grindle berupa *Content of Policy (Interest Affected, Type of Benefits, Extent of Change Envision, Site of Decision Making, Program Implementator, Resources Committed)* dan *Conetxt of Policy (Power, Interest, and Strategy of Actor Involved; Institution and Regime Characteristic; Compliance and Responsiveness)* yang berpengaruh positif.

Kata Kunci : Implementasi, Penguatan Pendidikan Karakter, SMK Negeri 7 Semarang

1

2

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan di Indonesia saat ini cenderung mengalami perubahan orientasi, bahkan mengarah pada persimpangan jalan. Di satu sisi pendidikan telah meningkatkan kualitas kompetensi ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi di sisi lain kompetensi karakter terabaikan. Sementara itu karakter merupakan suatu pondasi bangsa yang sangat penting dan perlu ditanamkan sejak dini kepada anak-anak. Hal ini disebabkan oleh ukuran-ukuran dalam pendidikan tidak dikembalikan pada nilai-nilai keluhuran budi pekerti dan karakter siswa, tetapi kecenderungan masyarakat yang bersifat rasional-kapitalisme, dimana siswa setelah menyelesaikan proses pendidikan dapat segera mendapatkan pekerjaan sesuai kompetensi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang umumnya dikembalikan pada kebutuhan pasar di dunia kerja.

Proses pembangunan karakter melalui pendidikan merupakan proses panjang dan memerlukan waktu yang lama, dimana telah menjadi komitmen bersama seluruh komponen bangsa dari masa ke masa. Budimansyah (2009:16) menyatakan bahwa secara historis dan sosio-kultural pembangunan bangsa dan pembangunan karakter (*nation and character building*) merupakan komitmen nasional yang telah lama tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) merupakan gerakan pendidikan di bawah tanggungjawab satuan pendidikan. PPK yang mempunyai tujuan memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga. Sinergi antar-satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat dibutuhkan dalam PPK yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental

(GNRM). Salah satu pokok penting dalam pelaksanaan PPK tercantum dalam Pasal 2 adalah upaya serius pemerintah untuk merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi berbagai elemen dalam ekosistem pendidikan. Selain pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik, PPK juga menasar kelompok masyarakat dan lingkungan keluarga sebagai pendidik utama dan pertama.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP/MTs. (UU Nomor 20 Tahun 2013, Pasal 18 ayat 3). Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. (UU Nomor 20 Tahun 2013, Penjelasan Pasal 15).

Berdasarkan hasil pengamatan awal, siswa SMK Negeri 7 Semarang dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2020 tercatat tidak terjadi kasus kenakalan remaja yang terjadi (Wawancara dengan Dinas Pendidikan dan Guru SMK Negeri 7 Semarang). Adapun pengamalan pendidikan karakter di SMK Negeri 7 Semarang juga telah jauh diimplementasikan sebelum adanya regulasi baku mengenai PPK terhadap satuan pendidikan. Dikarenakan SMK Negeri 7 Semarang merupakan sekolah menengah kejuruan, pihak sekolah berupa Kurikulum, Kesiswaan, Humas, dan Guru juga melakukan peran aktif dalam pelaksanaan PPK dalam kegiatan belajar mengajar (KBM). Selain itu SMK Negeri 7 Semarang juga melakukan koordinasi langsung dengan orang tua murid terhadap upaya optimalisasi PPK. Hal tersebut dikarenakan pendidikan karakter merupakan sentuhan kebiasaan yang memang harus dilaksanakan terus-menerus

melalui peran kontrol masing-masing pihak.

B. Tinjauan Pustaka

1. Administrasi Publik

Administrasi publik, menurut Chandler dan Plano dalam Pasolong (2013) adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengolah keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Chandler dan Plano menekankan bahwa administrasi publik merupakan suatu proses untuk mengatur keputusan-keputusan dalam kebijakan publik dan mengatur hal-hal yang berhubungan dengan urusan publik untuk memecahkan masalah-masalah publik.

2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Thomas Dye (Subarsono, 2013) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever government choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik.

James E. Anderson dalam Subarsono (2013) mendefinisikan bahwa publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah. Dalam konteks ini kebijakan publik dipahami sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, industri, pertahanan, dan sebagainya.

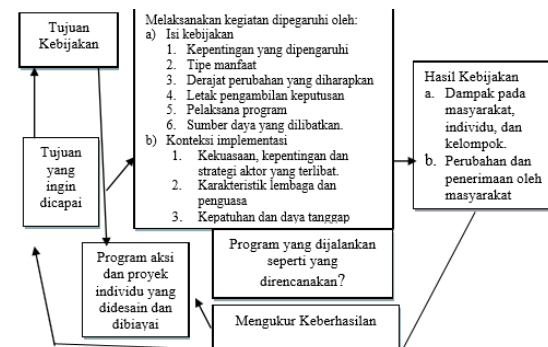
3. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang paling krusial dalam proses kebijakan

publik. Suatu program kebijakan harus di implementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan (Leo Agustino, 2017:126).

Model implementasi yang digunakan adalah Grindle dalam Leo Agustino (2017:143-145) mengatakan bahwa keberhasilan implementasi ditentukan oleh tingkat *implementability* yang terdiri atas *Content of Policy* dan *Context of Policy*. *Content of Policy* mencakup:

Gambar 1



Model Implementasi Grindle

(Sumber: Grindle dalam Tahir (2011:114))

4. Pendidikan Karakter

Menurut Sriwilujeng (2017: 3) "pendidikan karakter dapat membantu mengatasi krisis moral dinegara kita". Krisis moral yang dimaksud berupa maraknya angka kekerasan di kalangan anak dan remaja, kenakalan terhadap teman, pencurian, kebiasaan menyontek, penyalahgunaan obatobatan, pornografi dan perusakan property orang lain. Hal-hal tersebut merupakan bentuk masalah sosial yang hingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas dan menjadi indikasi bahwa

pendidikan karakter adalah kebutuhan yang penting dan pendidikan karakter diharapkan dapat di implementasikan secara sinergis di sekolah, di rumah dan di kalangan masyarakat secara umum.

Penguatan pendidikan karakter merupakan program yang saat ini sedang dilaksanakan pemerintah kepada seluruh sekolah di Indonesia. Menurut Kemendikbud (2016: 2) “penguatan pendidikan karakter adalah program pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan dukungan perlibatan publik dan kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)”. Menurut Sulistyowati dalam (Al-Anwari, 2014: 235) menyatakan bahwa “penyelenggaraan pendidikan pada konteks mikro berfokus kepada implementasi pendidikan karakter di sekolah”.

Pengaturan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal atau disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan Untuk mengembangkan pendidikan karakter siswa dibutuhkan penguatan pendidikan karakter ini yang diwacanakan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 terutama pada Pasal 1 ayat (5), (6) dan (7), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1).

C. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah serta tujuan dan kegunaan penelitian, maka

dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif juga bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta, objek, atau subjek apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat. Dengan metode yang digunakan tersebut diharapkan dapat menghasilkan data deskripsi yang baik berupa kata-kata tertulis atau lisan dengan orang-orang yang perilakunya dapat diamati, sehingga tergambar dengan jelas bagaimanakah Implementasi Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Di Satuan Pendidikan Formal SMK Negeri 7 Semarang.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data primer

Data primer adalah data informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya di lapangan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada informan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka atau bahan informasi lain yang berhubungan dengan implementasi pendidikan karakter

3. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, antara lain:

a. Observasi

Menurut Nawawi & Martini, observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Tujuan observasi adalah mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang

berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian yang diamati tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka. Wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara ataupun dengan tanya-jawab secara langsung.

c. Dokumen

Dokumen yaitu data yang didapatkan dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh instansi terkait, dalam hal ini dokumen terkait adalah mengenai pedoman implementasi pendidikan karakter, khususnya di SMK Negeri 7 Semarang.

d. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan mempelajari buku-buku, referensi, laporan, media cetak yang berkaitan dengan implementasi pendidikan karakter di SMK Negeri 7 Semarang.

PEMBAHASAN

A. Implementasi PPK di SMK Negeri 7 Semarang

1. Pendidikan Karakter di SMK Negeri 7 Semarang

Sebelum adanya pengaturan mengenai penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal, SMK Negeri 7 Semarang telah melaksanakan pendidikan karkter. Hal tersebut diungkapkan oleh informan 4, berikut penjelasannya:

“Jauh sebelum adanya pengaturan mengenai pendidikan karakter oleh pemerintah, sejak lahirnya SMK 7 Semarang pada 7 Juni 1971 kemudian penerapan yang secara sah pada tahun 1986 sudah diberlakukan adanya pendidikan karakter disini. Pembangunan pendidikan karakter di SMK Negeri 7 Semarang dahulu sudah diutamakan, sekolah pada mulanya menerapkan indikasi berupa tinggi badan, karakter, dan idealitas lain-lain untuk mengutamakan siswa yang masuk disini bahwasannya aspek utama adalah karakter siswa terlebih dahulu.” (Wawancara 4 November 2020)

Sebagaimana pernyataan yang dinyatakan oleh informan 4, pada mulanya pendidikan karakter di SMK Negeri 7 Semarang sejak didirikan sudah menerapkan adanya implementasi pendidikan karakter. Tetapi berdasarkan hasil wawancara tersebut, dinyatakan bahwa pendidikan karakter pada mulanya hanya didasarkan pada aspek fisik dan idealis perilaku siswa dalam *screening* awal. Kemudian setelah adanya pengaturan dari Pemerintah Provinsi sejak tahun 2014 terhadap kewajiban adanya PPK di sekolah kini SMK 7 Semarang lebih terfokus pada persiapan siswa didik ke jenjang berikutnya sebagaimana disampaikan oleh informan 2, berikut penjelasannya:

“Penerapan PPK di SMK Negeri 7 Semarang sudah dilakukan sejak dulu, karena disini fungsi dari SMK sebagai sekolah vokasi atau kejuruan yaitu membentuk lulusan yang siap bekerja di industry. Untuk mempersiapkan para siswa kami di jenjang kedepannya maka kita perkuat dengan adanya PPK agar nantinya tidak ada gap dalam dunia kerja.” (Wawancara 7 September 2020).

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang telah disampaikan infroman sebagaimana di atas, menunjukkan bahwa SMK Negeri 7 Semarang memang sudah

sangat lama mengupayakan dan berperan aktif dalam PPK terutama tujuannya untuk memperbaiki degradasi moral dari anak muda zaman sekarang. Kemudian semakin bertambahnya tahun beberapa kebijakan telah dibuat oleh SMK Negeri 7 Semarang dengan menanamkan nilai karakter terhadap siswa melalui tenaga pendidik. Penanaman karakter pada siswa memang tidak mudah melainkan memerlukan peran serta aktif dan ketegasan dalam upaya pembiasaan oleh sekolah dan guru. Adanya pembiasaan oleh guru dan ketegasan melalui peraturan di sekolah maka siswa akan terus terbiasa dengan bentuk-bentuk penerapan karakter yang diajarkan. Minimalisasi kenakalan remaja berupa adanya degradasi nilai moral pada generasi masa kini merupakan peran serta dari pemerintah, tenaga pendidik, dan tentunya siswa itu sendiri.

2. Nilai-Nilai Karakter yang Ditanamkan

Berdasarkan pengaturan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal diketahui bahwa Program Pendidikan Karakter (PPK) diaplikasikan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam PPK terutama meliputi nilai-nilai religious, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari 5 (lima) nilai utama yang saling berkaitan yaitu religious, nasionalis, integritas, mandiri, dan gotong royong yang terintegrasi dalam kurikulum pendidikan.

a. Nilai Religius

Agama yang dianut oleh siswa SMK Negeri 7 Semarang sangat beragam, yakni antara lain adalah Islam, Kristen, dan

Katholik. Keberagaman kepercayaan tersebut tidak mengurangi adanya penerapan nilai religious yang ada di SMK Negeri 7 Semarang. Beberapa program yang dijalankan oleh SMK Negeri 7 Semarang dalam menanamkan dan membangun nilai religious terhadap siswa yakni dengan program pendalaman agama pada tiap-tiap jam pelajaran agama, mentoring tiap hari Jumat, perayaan hari besar agama, dan adanya ekstrakurikuler kegamaan.

Adanya program dalam implementasi nilai religious tersebut sejalan dengan pernyataan yang diberikan informan 3, yang menyatakan:

“Dalam pembangunan karakter religious terhadap siswa untuk penerapannya pada tiap-tiap jam mata pelajaran agama Islam, Kristen, dan Katholik oleh guru agama masing-masing. Kemudian untuk mentoring pada hari Jumat, untuk agama Islam setelah diadakannya Sholat Jumat dan agama Kristen serta Katholik ketika selesai kelas pada hari Jumat. Selain itu juga ada perayaan kegaitan keagamaan dari siswa per tahunnya kemudian ada ekstrakurikuler keagamaan.” (Wawancara 7 September 2020)

Pernyataan tersebut senada dengan ungkapan informan 4, yang menyatakan:

“Kegiatan keagamaan untuk Islam dilakukan di masjid pada hari Jumat sekaligus adanya mentoring dimana pesertanya adalah kelas 10 dan mentoringnya adalah kakak kelas dan guru agama. Selain itu di SMK Negeri 7 Semarang ada bermacam-macam ekstrakurikuler yang dapat dipilih siswa beberapa diantaranya adalah ekstrakurikuler keagamaan.” (Wawancara 4 November 2020).

b. Nilai Nasionalis

Nilai nasionalis yang diterapkan di SMK Negeri 7 Semarang merupakan peranan

penting terhadap implementasi kehidupan siswa sehari-hari bagi bangsa dan negara. Adapun implementasi dari nilai nasionalis yakni berupa adanya upacara wajib setiap hari Senin, adanya upacara peringatan pada hari besar nasional serta kewajiban menyanyikan lagu Indonesia dan lagu-lagu nasional ketika pelaksanaan belajar mengajar. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan dari informan 3, yang menyatakan:

“Penerapan nasionalis disini berupa adanya pelaksanaan upacara wajib tiap hari Senin di lapangan upacara dengan menugaskan siswa sebagai petugas upacara.” (Wawancara 7 September 2020)

Hal serupa juga diungkapkan oleh informan 2, yang menyatakan:

“Ketika hendak memulai jam pelajaran dan akhir dari jam pelajaran pembiasaan dilakukan terhadap siswa berupa menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan lagu daerah, menyanyikan lagu wajib nasional yang dipimpin oleh guru mata pelajaran pertama dan dirigen berasal dari siswa yang ditugaskan. Adapun ketentuan tersebut sejalan dengan yang ada di RPP tiap-tiap guru dalam pengamalan PPK.” (Wawancara 7 September 2020)

Berdasarkan hasil observasi di SMK Negeri 7 Semarang telah diterapkan adanya nilai nasionalis terhadap peserta didik. Dimana nilai tersebut merupakan perwujudan kecintaan siswa terhadap tanah air dan nasionalisme tersebut dilandasi oleh Pancasila yang akan menuntun siswa untuk memiliki sikap guna menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan tenggang rasa.

c. Nilai Integritas

Penrapan nilai integritas di SMK Negeri 7 Semarang terwujud dalam program HANSEK (Ketahanan Sekolah) yang merupakan program PPK khusus di SMK

Negeri 7 Semarang. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan informan 2, yang menyatakan:

“HANSEK atau Ketahanan Sekolah merupakan program khusus di SMK Negeri 7 Semarang dimana dalam pelaksanaannya diterapkan terhadap siswa baik angkatan pertama hingga angkatan keempat.” (Wawancara 7 September 2020)

Pernyataan tersebut sejalan dengan informan 3, yang menyatakan:

“Program HANSEK disini merupakan kegiatan wajib tiap tahunnya dimana guru bekerjasama dengan Akmil di Magelang dimana instruktur khusus dari pihak Akmil. Program HANSEK dilaksanakan selama satu minggu dalam setahun sekali terhadap siswa tingkat pertama hingga akhir.” (Wawancara 7 September 2020)

Program PPK berupa HANSEK di SMK Negeri 7 Semarang merupakan program khusus yang dilakukan guna menanamkan integritas bagi para siswa. Sehingga nantinya dapat diketemukan *output* bagi siswa berupa dampak positif dalam membentuk karakter siswa.

d. Nilai Mandiri

Penanaman nilai karakter mandiri dapat dilakukan dalam penyelesaian pelajaran di sekolah yang diberikan melalui pelajaran di sekolah dan adanya kegaitan rutin harian di rumah berupa pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan dari informan 1, yang menyatakan:

“Sekolah Kejuruan sendiri memang implementasi penerapan berbasis mandiri karena memang dipersiapkan untuk dunia kerja. Dimana tidak hanya dituntut dalam hal pelajaran saja tapi ada tuntutan mandiri untuk jenjang ke depannya.” (Wawancara 9 November 2020)

Hal serupa juga dinyatakan oleh informan 4, yang menyatakan:

“Nilai-nilai Pancasila berupa mandiri disini berupa siswa dari SMK Negeri 7 Semarang yang dipupuk selama empat tahun dalam implementasi kemandirian. Mandiri disini diartikan bahwa suatu waktu siswa harus berkolaborasi dengan siswa lain dalam hal pandai menempatkan. Kemudian untuk aplikasinya ada tugas-tugas yang diberikan secara individu jadi siswa dituntut untuk dapat melakukan *problem solving* atas dasar kemampuannya sendiri.” (4 November 2020)

Nilai karakter mandiri menjadi salah satu dasar nilai penting yang dibudayakan di SMK Negeri 7 Semarang. Adapun aplikasi mandiri di SMK Negeri 7 Semarang yakni berarti tanggungjawab terhadap tugas-tugas dan pekerjaan priadinya tanpa melupakan adanya rasa empati dan kolaborasi dengan siswa yang lainnya.

e. Nilai Gotong Royong

Penerapan nilai Pancasila berupa gotong-royong di SMK Negeri 7 Semarang sendiri yakni berupa penerapan sistem kolaboratif dalam belajar antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan dari informan 4, yang menyatakan:

“Adanya pengaplikasian gotong royong di SMK Negeri 7 Semarang yakni kita menerapkan pembinaan terhadap siswa-siswa bahwasannya harus ada sikap gotong royong dalam kehidupan sesame manusia. Hal tersebut dalam realisasinya berupa tidak ada siswa yang boleh pintar sendiri dalam hal individualis, harus ada kolaboratif dengan siswa lainnya dimana hal tersebut disesuaikan dengan jati diri bangsa Indonesia.” (Wawancara 4 November 2020)

Pendapat tersebut diperkuat oleh pernyataan dari informan 6, yang menyatakan:

“Pengajaran mengenai gotong-royong menurut saya sangat diaplikasikan disini. Contoh dalam program-program ekstrakurikuler sebagai contoh konkretnya serta penerapan *forum discussion group* di kelas, dan *problem solving* bersama.” (Wawancara 10 September 2020)

Berdasarkan pernyataan informan di atas, bahwasannya penerapan nilai gotong-royong di SMK Negeri 7 Semarang sudah teraplikasi sebagaimana keterangan dari informan yang menyebutkan realisasi berupa saling tolong menolong antar siswa, adanya FDG (*forum discussion group*) dalam proses belajar mengajar, dan adanya kerja kelompok berupa penyelesaian kasus dalam mata pelajaran yang berkaitan.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi PPK di SMK Negeri 7 Semarang Berdasarkan Teori Implementasi Kebijakan Grindle

Implementasi program pendidikan karakter di SMK Negeri 7 Semarang memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaannya. Pada bagian ini penulis akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dengan menggunakan pendekatan implementasi kebijakan menurut Grindle. Menurut Grindle dalam Leo Agustino (2017:143) keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik ditentukan oleh tingkat *implementability* yang terdiri atas *Content of Policy* dan *Context of Policy*.

1. *Content of Policy*:

Content of Policy		
Interest Affected	Type of Benefits	Extent of Change Envision
1. Pihak-pihak yang memiliki pengaruh dalam PPK di SMK N 7 Semarang 2. Peran pihak-pihak yang memiliki pengaruh	1. Tujuan diterapkannya pendidikan karakter di sekolah 2. Pentingnya menerapkan pendidikan karakter	1. Target yang ingin dicapai 2. Tingkat keberhasilan Program PPK
Site of Decision Making	Program Implementator	Resources Committed
1. Pihak berwenang dalam pengambilan keputusan	1. Tingkat pemahaman pelaksanaan program 2. Kompetensi pelaksana program	1. Fasilitas penunjang 2. Dukungan anggaran 3. Ketersediaan SDM

2. Context of Policy:

Context of Policy		
Power, Interest, and Strategy of Actor Involved	Institution and Regime Characteristic	Compliance and Responsiveness
1. Penggunaan kekuasaan dalam Program PPK 2. Strategi aktor yang terlibat	1. Respon SMK Negeri 7 Semarang terhadap Program PPK	1. Tingkat kepatuhan pelaksana kebijakan 2. Respon pelaksana terhadap program PPK 3. Hambatan yang dirasakan oleh pelaksana

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi PPK di SMK Negeri 7 Semarang

SMK Negeri 7 Semarang sudah berperan aktif dalam kebijakan program PPK untuk meningkatkan karakter siswa di sekolah melalui penerapan pendidikan karakter dalam Kegiatan Belajar Mengajar dan program-program berupa ekstrakurikuler. Penanaman nilai karkter dilakukan oleh pihak sekolah melalui pembiasaan dari tenaga pendidik berupa guru dalam upaya menanamkan pendidikan karakter yang optimal agar menjadi suatu kebiasaan terhadap siswa di SMK Negeri 7 Semarang.

Berdasarkan pengaturan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal diketahui bahwa Program Pendidikan Karakter (PPK) diaplikasikan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam PPK terutama meliputi nilai-nilai religious, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli

sosial, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari 5 (lima) nilai utama yang saling berkaitan yaitu religious, nasionalis, integritas, mandiri, dan gotong royong yang terintegrasi dalam kurikulum pendidikan

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi PPK di SMK Negeri 7 Semarang Berdasarkan Teori Implementasi Kebijakan Grindle

Content of Policy berupa *Interest Affected*, *Type of Benefits*, *Extent of Change Envision*, *siTE OF Decision Making*, *Program Implementator*, dan *Resources Committed*. Serta *Context of Policy* berupa indikator *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved*; *Institution and Regime-Characteristic*; dan *Compliance and Responsiveness*.

B. Saran

1. Implementasi PPK di SMK Negeri 7 Semarang

Tujuan utama adanya pendidikan karakter di SMK Negeri 7 Semarang dikatakan dalam kesimpulan sebelumnya guna meningkatkan karakter moral terhadap siswa di SMK Negeri 7 Semarang secara berkelanjutan. Karena dalam hal ini diketahui bahwa pendidikan karakter adalah suatu sentuhan pembiasaan, yangmana apabila sudah mencapai beberapa aspek perlu meningkatkan aspek yang lain guna keberlangsungan dari optimalisasi tersebut.

Selanjutnya, pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah harus lebih menjangkau lagi terhadap pembinaan Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Semarang, harapannya kedepannya dalam implementasi kurikulum pendidikan karakter dimana sekolah menjadi andil dalam menerjemahkan kurikulum tersebut sesuai dengan kondisi di sekolah tidak terjadi suatu penyimpangan dalam penerjemahan tersebut. Sehingga cita-cita

mengenai implementasi program PPK yang optimal akan semakin optimal.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi PPK Berdasarkan Teori Implementasi Kebijakan Grindle

Berdasarkan kesimpulan di atas tiap-tiap faktor diketahui berpengaruh positif. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi PPK di SMK Negeri 7 Semarang berjalan dengan baik. Namun demikian, dikarenakan pendidikan karakter merupakan suatu sentuhan kebiasaan maka dari itu perlu untuk lebih melakukan pembaharuan dan peningkatan lebih. Hal tersebut dikarenakan tiap-tiap siswa akan selalu berubah-ubah dalam kurun waktunya, yangmana mengakibatkan perlunya ada suatu pendekatan dan program guna penyesuaian terhadap siswa tersebut.

Pihak sekolah diharapkan dapat melakukan FGD (Forum Diskusi Grup) dengan pihak orang tua murid dan melalui acara kegiatan OSIS Smk Negeri 7 Semarang agar dapat diketahui apabila terjadi masalah atau upaya yang perlu dilakukan dalam peningkatan PPK di SMK Negeri 7 Semarang. Selain itu fokus dari FGD tersebut dimaksudkan sebagai komunikasi dua arah agar tiap-tiap aktor yang terlibat dapat saling betukar pendapat dan pikiran dengan tujuan yang sama yakni meningkatkan pendidikan karakter di SMK Negeri 7 Semarang terhadap siswanya.

DAFTAR PUSTAKA

- A.G, Subarsono. (2013). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agustino, Leo. (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Al-Anwari A.M. (2014). Strategi Pembentukan Karakter Peduli Lingkungan di Sekolah Adiwiyata Mandiri. *Jurnal Ta'dib*. Volume 20. Nomor 19.
- Budimansyah. (2009). *PAKEM Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan*. Bandung: Penerbit Genesindo.
- Pasolong, Harbani. (2013). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sriwilujeng, Dyah. (2017). *Panduan Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Tahir, Arifin. (2011). *Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan